

Dampak Penyaluran Zakat, UMP, IPM dan TPT terhadap Kemiskinan di Aceh

Mafazal Muna¹, Zulkarnain M.Ali², Indra³

¹²³Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di Aceh selama periode tahun 2018-2023, model regresi panel metode fixed effect untuk menganalisis hubungan antara kelima variabel tersebut. Penelitian menemukan bahwa penyaluran zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Penyaluran Zakat, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan

Pendahuluan

Berdasarkan data dari BPS tahun 2023, Indonesia memiliki setidaknya 10 Provinsi yang masuk dalam daftar tingkat kemiskinan tertinggi karena mengalami kemiskinan di atas 10%. Provinsi tersebut terdiri dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTT, Sulawesi Tengah serta Sumatera Selatan. Kemiskinan menjadi polemik serius di Provinsi Aceh, terlebih setelah BPS merilis hasil sensus yang menempatkan Aceh sebagai Provinsi termiskin keenam di Indonesia dan pertama di Pulau Sumatera (BPS, 2023).

Sebagai daerah dengan penduduk hampir 99% Muslim, maka upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemanfaatan dana zakat. Untuk membantu mewujudkan pengentasan kemiskinan, Aceh dapat menggunakan keistimewaannya karena memiliki Baitul Maal Aceh (BMA) sebagai lembaga pemerintah yang bersifat independen dalam mengelola dan mengembangkan zakat serta harta keagamaan lainnya. Pengelolaan zakat di Aceh khusus dan berbeda dari Provinsi lain karena zakat menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD), sementara di Provinsi lain zakat tidak termasuk bagian dari PAD (BMA, 2022).

Pemerintah Aceh untuk mengatasi tingkat kemiskinan juga terus mengupayakan berbagai cara, diantaranya dengan meningkatkan upah, meningkatkan indeks pembangunan manusia, serta membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat Aceh agar dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan. Namun, meskipun telah melakukan beberapa upaya, kemiskinan di Aceh tetap tidak dapat dihilangkan secara permanen (BPK, 2021). Hingga Maret 2023, Aceh masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke 6 di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 806 ribu jiwa (14,45%) (BPS Aceh, 2023).

Hasil kajian mengenai keterkaitan antara penyaluran zakat dan kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait dampak penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Murniati, et al. (2015) menemukan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik berpengaruh nyata terhadap pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan di daerah Bogor, begitupun Fitri, et al. (2021) menemukan bahwa penyaluran zakat berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Saat zakat didistribusikan secara lebih luas, maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Konsisten dengan temuan Islam, penelitian empiris yang dilakukan Munandar et al. (2020) juga menemukan bahwa semakin tepat dan memadai jumlah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah maka kemiskinan akan menurun. Berbeda dengan temuan tersebut, hasil penelitian Martaliah, et al. (2023) menyimpulkan bahwa kenaikan penyaluran zakat tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Guna memperkuat temuan yang tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya, studi ini ingin menganalisis lebih lanjut keterkaitan antara kelima variabel yang ada, dengan menempatkan kemiskinan sebagai variabel endogen dan penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, serta tingkat pengangguran terbuka sebagai predictor variabel. Dengan menggunakan data panel dari 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, maka studi ini bertujuan untuk melihat apakah dengan

menggabungkan semua variabel maka studi ini dapat menggambarkan hasil yang lebih komprehensif, sehingga dapat menghasilkan jawaban terkait determinasi kemiskinan di Provinsi Aceh.

Landasan Teori

Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan

Mustaq Ahmad berpendapat bahwa zakat menjadi sumber utama perbendaharaan negara, sekaligus menjadi landasan kehidupan perekonomian sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran. Zakat mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan berbagi sekaligus mencegah penumpukan kekayaan. Zakat juga berperan menjadi lembaga distribusi kekayaan yang komprehensif, karena mencakup harta setiap muslim. Allah secara tegas melarang pengumpulan kekayaan hanya oleh satu orang atau sekelompok orang saja, sebagaimana surah Al-Hasyr ayat 7 (Hafidhuddin, 2002). Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan yang ditunjuk atau amil perorangan yang menangani pengumpulan zakat, dan disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam Surah at-Taubah ayat 60, yang dimaksud dengan “yang berhak menerima” adalah orang atau kelompok yang mengawasi pengelolaan harta dan zakat. Amil juga merupakan salah satu penerima yang berhak atas zakat (Antonio et al., 2020).

Zakat menjadi sumber pendanaan penting dalam struktur keuangan perekonomian Islam. Dalam pengertian modern, zakat merupakan pajak yang dipungut dari umat muslim berada untuk membantu muslim yang lemah ekonominya sehingga dapat menjadi makmur dan sejahtera. Dengan demikian zakat tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi juga instrumen fiskal dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan, sehingga zakat berperan memutar roda perekonomian tanpa henti (Elfadhli, 2016), serta juga ikut membantu perekonomian bagi para muallaf (Rahman et al., 2022).

Permasalahan terkait distribusi zakat seringkali menjadi pro dan kontra. Selama sejarah Islam dan pemerintahan para khalifah telah terjadi sentralisasi dan desentralisasi terkait distribusi zakat. Di Indonesia, desentralisasi menjadi

pilihan terbaik mengingat bahwa potensi pengumpulan dana zakat yang dimiliki sangat besar. Desentralisasi menjadi tindakan yang sesuai karena pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara ini menjadi lebih efektif dan efisien sebab pengelolaannya dapat diawasi oleh masyarakat melalui monitoring kinerja amil (Aisyah et al., 2019).

Dampak Upah Terhadap Kemiskinan

Dalam hal upah, Islam menawarkan solusi terbaik untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Penentuan upah dilakukan berdasarkan cara yang paling tepat tanpa menindas pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan hasil kerja sama yang dilakukan tanpa membebani pihak lain. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 279 yang artinya *".... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"*. Ayat tersebut menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan perjanjian upah yang dilaksanakan, sehingga tidak membiarkan adanya tindakan yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan sendiri. Prinsip keadilan dan kecukupan (kelayakan) sangat penting dalam penentuan upah dalam Islam, keadilan terletak pada kejelasan perjanjian kontrak dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Pada transaksi kerja, akad adalah suatu kontrak yang dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja, oleh karena itu sebelum mempekerjakan pekerja perlu kejelasan terlebih dahulu terkait bagaimana pekerja menerima upah, seberapa besar jumlah dan bagaimana tata cara pembayarannya. Perjanjian harus memastikan bahwa pekerja dibayar dengan bagian yang sesuai dari hasil kerja yang telah dilakukan. Demikian juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar lebih dari kemampuannya (Annisa'atun, 2011).

Bagi para pekerja, produktivitas dapat ditingkatkan melalui upah. Penentuan upah oleh Gubernur bertujuan agar masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyarakat, sehingga dapat menciptakan dorongan munculnya bentuk-bentuk usaha baru yang dapat berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan (Islami et al., 2019). Penelitian Moser dan Engbom (2020), terkait dampak upah

minimum terhadap kesenjangan pendapatan di Brazil menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pasar tenaga kerja di negara berkembang dan maju. Dalam kasus Brazil, menaikkan upah minimum disaat ketimpangan sangat tinggi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Sedangkan untuk negara maju, menaikkan upah minimum akan berdampak lebih kecil terhadap ketimpangan pendapatan (Paramita, 2021).

Dampak IPM Terhadap Kemiskinan

Para ekonom terdahulu seperti Adam Smith dan Veblen, menekankan pentingnya modal manusia dalam kegiatan produksi, dan ketika Adam Smith menjelaskan persediaan modal tetap suatu negara, dia memasukkan unsur “kemampuan penduduk yang diperoleh untuk memberikan nilai manfaat”. Bagi Veblen, pengetahuan serta teknologi dianggap sebagai perangkat tidak berwujud yang tidak nyata bagi masyarakat. Tanpa semua modal ini, modal fisik bahkan tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya. Oleh karena itu, para ekonom menjelaskan bahwa kurangnya investasi pada sumber daya manusia menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat di negara-negara berkembang. Artinya, tanpa pengembangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta kinerja fisik setiap individu maka produktivitas manusia akan menurun (Prase, 2000).

Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa untuk mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat, harus ada tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengarahkan dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Di negara-negara berkembang, kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya dieksploitasi dan dikembangkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya yang ada di negara tersebut, termasuk keterbatasan modal (Saragih, 2015). Kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia terjadi karena produktivitas rendah akibat sumber daya manusia yang rendah, sehingga pada gilirannya

juga berpengaruh pada upah yang rendah. Untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah. Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan konsumsi dan menghindari dari kemiskinan (Kuncoro, 2000).

Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Dalam sudut pandang Islam, pengangguran merupakan suatu hal yang buruk karena Islam selalu memerintahkan setiap individu muslim untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu arah utama Islam untuk mencapai kesempurnaan pencapaian. Islam menganjurkan setiap individu muslim untuk bekerja dan memproduksi, apabila mereka memiliki kemampuan, merekalah yang dianjurkan untuk menciptakan lapangan kerja. Karena pekerjaan dan ketenagakerjaan merupakan dua hal yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Islam berusaha untuk memastikan umatnya tidak menganggur dan menjadi miskin. Karena ditakutkan dengan adanya kemiskinan maka seseorang akan berbuat apa saja yang nanti dapat merugikan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ada hadis yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran (Sari, 2020).

Pengangguran merupakan masalah utama bagi keberlangsungan Pembangunan negara. Setiap manusia pada dasarnya diwajibkan untuk bekerja, sebagaimana dalam QS. Al-A'raf: 10. Konsep bekerja dalam Islam merupakan kewajiban agama yang menyeluruh bagi setiap individu muslim yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan pribadi, keluarga, dan masyarakat (Walian, 2012). Namun jika keadaan Masyarakat tidak ada pekerjaan karena sulitnya mencari pekerjaan atau karena kurangnya lapangan kerja. Maka, negara harus menciptakan lapangan kerja bagi mereka untuk terus membangun keberlangsungan negara. Adapun untuk mencapai kesejahteraan, Islam memberikan sarana, termasuk penyediaan lapangan kerja yang merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan (Sutjipto, 2003).

Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berbentuk data panel, terdiri dari data *time series* (runut waktu) selama periode tahun 2018-2023 ($n = 6$) serta *cross section* (data silang) dari 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Data kemiskinan dan upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Selanjutnya data penyaluran zakat bersumber dari Baitul Mal Aceh (BMA).

Dalam memenuhi kepentingan analisis kuantitatif mengenai keterkaitan dari kelima variabel, maka penjelasan pengukuran dari masing-masing variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan dengan satuan persen, adapun penyaluran zakat dan upah minimum provinsi dengan satuan rupiah.

Analisis pengaruh penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan menggunakan model ekonometrika dengan regresi data panel, hal tersebut didasarkan atas sebab estimasi mengenai hubungan fungsional antar variabel yang pada dasarnya menggunakan data panel. Sehingga model regresi tersebut diformulasikan dengan:

$$\hat{k}_{it} = a_0 + a_1PZ_{it} + a_2UMP_{it} + a_3IPM_{it} + a_4TPT_{it} + e_{it}$$

Dimana:

a_0 : Konstanta

$\hat{k}_{it}$: Tingkat kemiskinan di kabupaten/kota i pada tahun t

PZ_{it} : Realisasi penyaluran zakat di kabupaten/kota i pada tahun t

UMP_{it} : Upah minimum provinsi di kabupaten/kota i pada tahun t

IPM_{it} : Indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota i pada tahun t

TPT_{it} : Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota i pada tahun t

i : Kabupaten/kota (1, 2, ..., 23)

t : Periode Tahun (2018, 2019, ..., 2023)

e : *Error Term*

Dalam memperkirakan parameter analisis terdapat tiga pendekatan regresi pada data panel, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (Gujarati et al., 2009). Agar memperoleh model terbaik dan akurat maka digunakan beberapa pengujian, diantaranya uji chow untuk memilih

antara *common effect model* atau *fixed effect model*, dan uji hausman untuk memilih antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Penentuan signifikansi pengaruh predictor variable (penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan didasarkan pada nilai p-value yang dihasilkan oleh proses pengolahan data dengan menggunakan software E-Views12, dengan ketentuan jika suatu variabel memiliki nilai p-value $< 0,05$ berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan. Sebaliknya, apabila nilai p-value $> 0,05$ berarti tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya pengujian signifikansi pengaruh kedua predictor variable tersebut (secara simultan) digunakan statistik uji F, dengan ketentuan jika p-value $< 0,05$ berarti kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya p-value $> 0,05$ maka secara statistik menginformasikan bahwa kedua variabel tidak berpengaruh signifikan.

Results and Discussion

Tingkat kemiskinan, penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, serta pengangguran terbuka relatif bervariasi di Provinsi Aceh. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antar kabupaten dan kota, namun juga dalam periode waktu yang berbeda. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Aceh Singkil (20,15%), disusul Gayo Lues (19,53%), dan Pidie (19,38%). Sebaliknya, daerah dengan kemiskinan terendah adalah Banda Aceh (7,19%), Langsa (10,65%), dan Lhokseumawe (11,08%). Pada tahun yang sama, daerah dengan penyaluran zakat paling tinggi adalah Aceh Utara (Rp. 23,6 M), Banda Aceh (Rp. 17,2 M), dan Aceh Barat (Rp. 10 M). Sebaliknya daerah dengan penyaluran zakat terendah adalah Pidie (Rp. 193 Juta), Pidie Jaya (Rp. 1,6 M), dan Subulussalam (Rp. 1,7 M).

Terkait upah, Aceh mengalami kenaikan upah minimum provinsi sebesar 7,8% dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari Rp. 3.166.460 menjadi Rp. 3.413.666. Adapun indeks pembangunan manusia tahun 2023, daerah tertinggi adalah Banda Aceh (88,32%), Lhokseumawe (80,26%), dan Langsa

(80,5%). Sebaliknya daerah terendah adalah Subulussalam (69,66%), Simeulue (69,98%), dan Aceh Timur (70,73%). Sedangkan pengangguran terbuka tertinggi tahun 2023 adalah daerah Lhokseumawe (8,78%), Aceh Besar (8,17%), dan Aceh Timur serta Banda Aceh (8,03%). Sebaliknya daerah terendah adalah Bener Meriah (2,45%), Gayo Lues (2,65%), dan Aceh Jaya (2,88%).

Dalam menganalisis model pengaruh penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, digunakan regresi panel dengan model ekonometrika meliputi tiga pendekatan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk menentukan pilihan antara tiga pendekatan digunakan alat estimasi yaitu *chow test* dan *hausman test*. *Chow test* digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* dengan melihat nilai *cross section*. Apabila nilai *p-value* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*, sebaliknya jika nilai *p-value* < 0,05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*. Berdasarkan hasil dari *chow test* diperoleh:

Tabel 1. Hasil *chow test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	403.253071	(22,111)	0.0000
Cross-section Chi-square	606.304496	22	0.0000

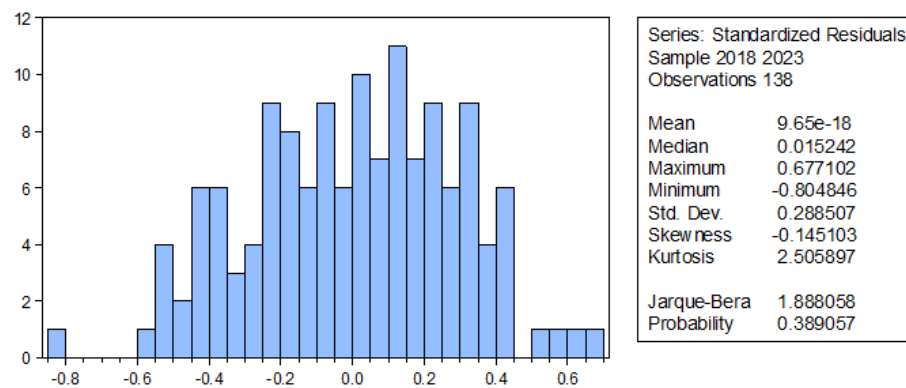
Berdasarkan Tabel 1, diperoleh nilai *p-value* sebesar $0,0000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah model *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan *hausman test* untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* dengan melihat nilai apabila *p-value* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *random effect*, sebaliknya jika nilai *p-value* < 0,05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*. Berdasarkan hasil dari *hausman test* diperoleh:

Tabel 2. Hasil *hausman test*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.918709	4	0.0418

Tabel 2, memperoleh nilai *p-value* sebesar $0.0418 < 0,05$, artinya model *fixed effect* lebih baik dari *random effect*. Sebagaimana hasil *chow test* sebelumnya

yang juga mengindikasikan bahwa model *fixed effect* juga lebih baik. Untuk memperoleh ketepatan estimasi dengan menggunakan regresi panel sebagai alat analisis data, maka tidak terlepas dari adanya asumsi klasik. Untuk model *fixed effect* yang terpilih, uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Basuki et al., 2015). Berdasarkan output Eviews, estimasi pengaruh penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan telah memenuhi asumsi normalitas residual. Hal ini sebagaimana ditunjukkan gambar 1.



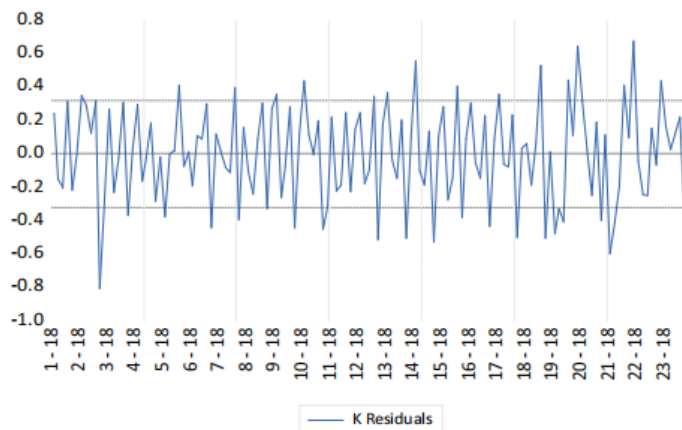
Gambar 1. Normalitas Residual

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa nilai *Jarque-Bera test* sebesar 1,888 dengan prob sebesar $0,389 > 0,05$, dengan demikian dapat diartikan bahwa residual estimasi terdistribusi secara normal. Adapun koefisien korelasi antar variabel sebagai berikut:

Correlation Probability	PZ	UMP	IPM	TPT	K
PZ	1.000000 -----				
UMP	-0.048141 0.5750	1.000000 -----			
IPM	0.313861 0.0002	0.301651 0.0003	1.000000 -----		
TPT	0.138810 0.1044	0.001947 0.9819	0.247608 0.0034	1.000000 -----	
K	-0.234015 0.0057	-0.196317 0.0210	-0.616339 0.0000	-0.336800 0.0001	1.000000 -----

Gambar 2. Koefisien korelasi antar variabel

Nilai hubungan korelasi antara penyaluran zakat dan kemiskinan menunjukkan angka negatif sebesar -0,234 maka diartikan bahwa tingkat keeratan hubungan sangat lemah. Adapun upah minimum provinsi dan kemiskinan bernilai negatif -0,196 (sangat lemah), indeks pembangunan manusia dan kemiskinan bernilai negatif -0,616 (kuat), tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan bernilai negatif -0,336 (lemah). Adapun nilai koefisien korelasi yang diperoleh semuanya $<$ dari 0,85, sehingga dapat disimpulkan terbebas dari multikolinearitas (Napitupulu et al., 2021). Selanjutnya dilakukan Uji Heteroskedastisitas pada data panel, untuk melihat apakah model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Adapun hasil Uji Heteroskedastisitas:



Gambar 3. Uji heteroskedastisitas residual

Gambar 3 menunjukkan grafik residual tidak melewati batas (500 dan -500), karena hasil yang diperoleh adalah -1,0 dan +0,8. Artinya, varian residual masih berada pada batas 500 dan -500, bahkan cenderung masih sangat jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.54453	2.292648	12.01429	0.0000
PZ	0.000385	0.001159	0.331974	0.7405
UMP	-0.015782	0.002422	-6.516207	0.0000
IPM	-0.101942	0.039784	-2.562378	0.0117
TPT	0.018349	0.037896	0.484200	0.6292

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.992807	Mean dependent var	15.48457
Adjusted R-squared	0.991122	S.D. dependent var	3.401660
S.E. of regression	0.320520	Akaike info criterion	0.735840
Sum squared resid	11.40341	Schwarz criterion	1.308563
Log likelihood	-23.77294	Hannan-Quinn criter.	0.968580
F-statistic	589.2263	Durbin-Watson stat	2.470939
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 4. Hasil Regresi Panel

Berdasarkan tabel 4, hubungan fungsional antara tingkat kemiskinan dengan penyaluran zakat, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan dalam persamaan:

$$K_{it} = 27,544_{it} + 0,0003 PZ_{it} - 0,0157 UMP_{it} - 0,1019 IPM_{it} + 0,0183 TPT_{it}$$

Penyaluran zakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien estimasi sebesar 0,0003 ($p\text{-value} = 0,7405 > 0,05$). Secara statistik, angka tersebut diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan penyaluran zakat sebesar 1 milyar maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan sebesar 0,0003%. Berdasarkan tinjauan pustaka, permasalahan tidak efektifnya penyaluran zakat pada BMA adalah karena tidak adanya sistem dan teknologi khusus pada pengelolaan seluruh database mustahik dan muzakki secara lengkap dan terkini, sehingga penyaluran zakat menjadi kurang tepat sasaran (Damanhur et al., 2022). Permasalahan lain adalah penyaluran zakat pada sektor pemberdayaan ekonomi hanyalah sebesar 15%, sedangkan dakwah dan syiar Islam 5%, sosial 42%, pendidikan 29%, dan kesehatan 9%. Adapun masyarakat Aceh sendiri lebih sering menyalurkan zakat melalui *Tengku Gampoeng* (Ustad Pengelola Kampung), sehingga dari segi pencatatan, data penyaluran zakat tidak semua terdata pada Baitul Mal Aceh. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat miskin serta meningkatkan taraf hidup dengan kekuatan yang dimiliki (Furqani et al., 2018). Namun penyaluran zakat yang lebih banyak pada sektor konsumtif dan tidak tepat

sasaran tidak membantu dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Martaliah et al. (2023), Marbun (2018), dan Hilmiyah (2017), serta bertolak belakang dengan Tawakkal et al. (2018), dan Fitri et al. (2021).

Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Aceh dengan koefisien estimasi sebesar $-0,0157$ ($p\text{-value} = 0,0000 < 0,05$). Diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan upah sebesar 1 juta maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar $0,0157\%$. Dalam teori efisiensi upah dinyatakan bahwa produktivitas pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah. Pekerja yang dibayar dengan upah memadai memiliki nutrisi dan lebih sehat sehingga menjadi lebih produktif (Ghofur, 2020). Pengupahan dalam konsep ekonomi Islam, menghargai peran pemerintah (negara) dalam mengontrol ketidaksempurnaan dalam pengupahan. Adanya kebijakan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur memberikan dampak perbaikan kondisi sosial ekonomi pekerja sehingga membuka peluang meningkatnya taraf hidup dan daya beli sehingga membantu penurunan kemiskinan (Fajriansyah et al., 2022). Moser dan Engbom (2020) berpendapat peningkatan UMP pada negara berkembang memiliki pengaruh besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan pada negara maju berdampak lebih kecil. UMP di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami peningkatan meskipun tidak drastis. Adanya penyesuaian kenaikan UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Aceh agar para pekerja dapat terlindungi dari tekanan inflasi yang berisiko menggerus daya beli (BPS, 2023). Peningkatan UMP membantu meningkatkan daya beli dan menjaga semangat dan efisiensi para pekerja (Putri et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Utami et al. (2018), Ihsan et al. (2018) dan Fajriansyah et al. (2022) serta bertolak belakang dengan Angga et al. (2020) dan Putri et al. (2021).

Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Aceh dengan koefisien estimasi $-0,1019$ ($p\text{-value} = 0,0117 < 0,05$). Diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka akan berdampak pada penurunan

tingkat kemiskinan sebesar 0,1019%. Menurut Kuncoro (2010) hal yang menjadi fokus utama dalam suatu pembangunan adalah meningkatkan kualitas manusia. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (Prasetyoningrum et al., 2018). IPM terdiri dari 3 dimensi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak yang menentukan kualitas manusia (BPS, 2023). Pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kapasitas, kesehatan merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas, karena dengan kesehatan, pendidikan mudah dicapai, dengan pendapatan tinggi maka akan mudah mengeluarkan dana untuk kesehatan dan pendidikan (Prasetyoningrum et al., 2018). Berdasarkan data BPS, IPM di Provinsi Aceh dari tahun 2018 hingga 2023 terus mengalami peningkatan, sehingga kemiskinan di Aceh juga ikut berkurang melalui peningkatan dari dimensi pengetahuan, kesehatan serta kehidupan layak. Pemerintah dalam menentaskan kemiskinan menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas (Putri et al., 2021). Oleh karenanya banyak orang mengenyam pendidikan dengan harapan dapat mengubah jenjang kehidupannya (Syahrullah, 2014).

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Aceh dengan koefisien estimasi 0,0183 ($p\text{-value} = 0,6292 > 0,05$). Diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pengangguran terbuka sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan sebesar 0,0183%. Berdasarkan data BPS, TPT di kabupaten/kota Provinsi Aceh mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid 19 yang membuat pekerja mengalami PHK, adapun pada tahun lainnya TPT mengalami penurunan. Pengangguran terbuka terjadi sebab pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat sedangkan tingkat pertumbuhan angkatan kerja cepat. Tingginya pengangguran juga dapat

mencerminkan tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia (Jundi et al., 2014). Hal ini memberikan gambaran bahwa selalu terdapat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan (Putri et al., 2021). Pengangguran menjadi tolak ukur dalam perekonomian, sehingga mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan sosial. Hal ini diikuti dengan penurunan pendapatan perkapita (Whisnu Adhi, 2011). Penurunan pendapatan akan menyebabkan para pengangguran mengurangi pengeluaran konsumsinya sehingga mengurangi kesejahteraan (Silalahi et al., 2020). Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator penyebab tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan akan terbatas (Ferayanti et al., 2023). Oleh karenanya pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Aceh adalah supaya tingkat pengangguran menjadi turun dan masyarakat memiliki pengasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan Hidupnya Penelitian ini sejalan dengan Ihsan et al. (2018) dan Putri et al. (2021), serta bertolak belakang dengan Patryano (2016), Hasballah (2021) dan Fajriansyah et al. (2022).

Conclusion

Pemerintah Aceh dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penyaluran zakat oleh *Baitul Mal Aceh* sebagai lembaga pengelola zakat, namun juga melalui kebijakan peningkatan upah dan indeks pembangunan manusia serta pengurangan tingkat pengangguran melalui pembukaan lapangan usaha baru. Penelitian ini menganalisis dampak penyaluran zakat, ump, ipm dan tpt terhadap kemiskinan di Aceh. Menggunakan data dari 23 kabupaten/kota selama periode 2018-2023, panel regresi model *fixed effect*. Penelitian menemukan bahwa Penyaluran Zakat ditemui tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa penyaluran zakat selama ini belum berdampak efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Upah Minimum Provinsi ditemui berdampak signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa adanya kenaikan upah memiliki dampak penting terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Indeks Pembangunan Manusia ditemui berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi IPM maka akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan. IPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran memiliki peran penting terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Aceh. Tingkat Pengangguran Terbuka ditemui tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat dampak atau keterkaitan secara langsung antara tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Mengacu pada kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengambil kebijakan atau penelitian selanjutnya:

1. Fakta bahwa penyaluran zakat tidak berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa meskipun penyaluran zakat tidak berdampak langsung terhadap kemiskinan, namun BMA diharapkan mampu mengontrol dan mengoptimalkan penyaluran zakat secara efektif dan efisien melalui peningkatan sistem dan teknologi database mustahik dan muzakki secara lengkap dan terkini sehingga zakat yang disalurkan menjadi tepat sasaran. Selain itu BMA diharapkan dapat terus memaksimalkan kegiatan zakat produktifnya, meskipun saat ini kondisi penyaluran zakat yang ada di Provinsi Aceh masih dominan kepada konsumtif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat dapat tercipta pemerataan pendapatan dan membantu mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Fakta bahwa UMP berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh dalam mempertimbangkan besaran UMP diharapkan dapat menetapkan secara bijak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari tekanan inflasi yang melemahkan daya beli. Dalam menetapkan diharapkan pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi

dari para pengusaha, karena besaran UMP juga akan berdampak terhadap kesanggupan pengusaha membayar pekerja. Apabila ditetapkan terlalu tinggi maka dapat mendorong perusahaan mempekerjakan pekerja berketrampilan rendah atau mempekerjakan secara informal, adapun jika terlalu rendah maka berdampak pada kesejahteraan pekerja.

3. Fakta bahwa IPM berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sehingga kuantitas sdm yang berkualitas dapat mengalami peningkatan dan selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan. Dari segi pendidikan, diharapkan pemerintah dapat terus melanjutkan program beasiswa Pemerintah Aceh sebagaimana PERGUB Provinsi Aceh Nomor 58 Tahun 2017 secara lebih transparan. Dari segi kesehatan, diharapkan pemerintah Aceh dapat kembali melanjutkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yang telah banyak membantu masyarakat Aceh. Dari segi pengurangan ketimpangan dapat dilakukan dengan redistribusi pendapatan.
4. Fakta bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan mengindikasikan bahwa meskipun TPT tidak berdampak secara langsung pada kemiskinan, namun Pemerintah Aceh dalam upaya menurunkan kemiskinan diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja di seluruh kabupaten/kota. Belanja daerah untuk meningkatkan perekonomian harus berorientasi pada sektor yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar, seperti pertanian dan perkebunan karena mayoritas masyarakat Aceh bekerja pada sektor tersebut. Selain itu pendataan terhadap masyarakat juga harus dioptimalkan agar dapat melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap seberapa besar angkatan kerja yang dimiliki, sehingga dapat dilakukan pengelolaan dan pembinaan kepada angkatan kerja agar memiliki keahlian atau pendidikan yang dibutuhkan, sehingga dapat bersaing untuk saat ini dan dimasa mendatang.

References

- Aisyah, S., & Ismail, N. (2019). The distribution of zakat at the time of calipha Umar ibn Khattab. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2).
- Angga, A., & Fikriah, F. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 91-99.
- Annisa'atun, 2011 Ketentuan upah menurut uu no. 13 tahun 2003 dalam perspektif hukum islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(1).
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Al Ghifari, D. M. (2020). Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's perception. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235-254.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). Electronic data processing (SPSS 15 dan Eviews 7). *Yogyakarta: Danisa Media*.
- Damanhur, D., Hakim, A. F., & Ichsan, I. (2022). Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. *Journal of Economics Management and Business*, 23(1).
- Elfadhli, E. (2016). Zakat Produktif sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 99-112.
- Fajriansyah, S., & Chandriyanti, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 558-570.
- Fajriansyah, S., & Chandriyanti, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 558-570.
- Ferayanti, F., Seftarita, C., Fitriyani, F., & Varlitya, C. R. (2023). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of*

Economic Perspec, 9(1), 12-30.

- Fitri, C. D., Maulana, H., & Safitri, A. (2021). Analisis pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2007-2017. *EKOBIS SYARIAH*, 2(2), 45-54.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for economic empowerment (analyzing the models, strategy and implications of zakat productive program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 11(2), 391-411.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama. Cetakan Pertama.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics*. McGraw-hill.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Hasballah, I. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh di Kabupaten/Kota. *Jurnal Al-Fikrah*, 10 (1), 38-48.
- HILMIYAH, S. (2017). *PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Serang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN).
- Ihsan, K., & Ikhsan, I. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 408-419.
- Jundi, M. A., & Poerwono, D. (2014). *Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika pembangunan: Masalah, kebijakan, dan politik*. Erlangga.

- Kuncoro, M., (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Marbun, S. (2018). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan penyaluran dana zakat terhadap kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2011-2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan).
- Martaliah, N., Anita, E., & Rahman, F. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPM Terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2021. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 334-344.
- Martaliah, N., Anita, E., & Rahman, F. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPM Terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2010-2021. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 334-344.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1), 25-38.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. *Al-Mal*, 1(1), 25-38.
- Murniati, R., & Beik, I. S. (2015). Pengaruh zakat terhadap indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan mustahik: Studi kasus pendayagunaan BAZNAS kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 135-149.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*.
- Paramita, R. (2021). Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2).
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217-240.

- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(2), 106-114.
- Rahman, A. A., Saputra, J., & Possumah, B. T. (2022). The Success of Zakat Distribution to Asnaf Muallaf in Maintaining Their Belief and Thoughts on Islam: A Case Study in Terengganu. *Journal of Madani Society*, 1(1), 8-19.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 45-59.
- Sari, B. P. (2020). PENGARUH KEMISKINAN, UPAH MINIMUM, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP HUMAN DEVELOPMENT INDEX: STUDI KASUS 11 PROVINSI DENGAN KATEGORI LOWER MEDIUM DI INDONESIA TAHUN 2010-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Sutjipto, H. (2003). Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 19(4), 425-444.
- Syahrullah, D. (2014). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb), pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2009-2012.
- Tawakkal, M. I., & AH, D. S. (2018). Pengaruh zakat terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 704-711.
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 4(01).
- Walian, A. W. (2012). Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap

Pemahaman Kerja Seorang Muslim. *An Nisa'a*, 7(1), 65-80.

Whisnu Adhi, S. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang*.